



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3120>

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS

Emiraldo Win Pazqara¹

¹Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 11 Juni 2022

Revised date: 30 Juli 2022

Accepted date: 30 Juli 2022

ABSTRACT

Writing this scientific paper aims to describe the implementation of waste management policies in the Banyumas Regency area. The research uses a qualitative descriptive analysis model with competent informants in carrying out policies. The results of the analysis show that the implementation of waste management policies in Banyumas Regency from the communication aspect is quite good, it can be seen from the running of the policy socialization mechanism carried out by the office which is routine and quite intense to the community. Second, from the aspect of resources, it can be seen from implementing officials who understand the policy, but are constrained in efforts to change the mindset of the people who are used to being served in managing waste. Third, from the disposition aspect, it can be seen from the distribution of authority that is going well and coordinatively, including the implementation of the principle of partnership with the community through KSM, but on the other hand, it is constrained by the lack of experience of partners and limited operational funds. Fourth, from the aspect of bureaucratic structure, it can be seen from the availability of policy SOPs, including the functioning of the work monitoring and reporting system.

Keywords: Public Policy, Waste Management, Local Government.

ABSTRAKSI

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan model analisis deskriptif kualitatif dengan informan pihak-pihak yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dari aspek komunikasi berlangsung cukup baik, terlihat dari berjalannya mekanisme sosialisasi kebijakan yang dijalankan oleh dinas yang bersifat rutin serta cukup intens kepada masyarakat. Kedua, dari aspek sumber daya, terlihat dari aparat pelaksana yang memahami kebijakan, namun terkendala dalam upaya mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa dilayani dalam mengelola sampah. Ketiga, dari aspek disposisi, terlihat dari pembagian wewenang yang berjalan dengan baik dan koordinatif termasuk berjalannya prinsip kemitraan dengan masyarakat melalui KSM, namun di sisi lain terkendala dalam hal kurangnya pengalaman mitra kerja dan keterbatasan dana operasional. Keempat, dari aspek struktur birokrasi, terlihat dari ketersediaan SOP kebijakan, termasuk berjalannya sistem pengawasan dan pelaporan kerja.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Manajemen Sampah, Pemerintah Daerah.

UPNVJT. All rights reserved

PENDAHULUAN

Berbicara masalah sampah, hal ini adalah salah satu dari banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Sampah yang notabene merupakan residu hasil dari konsumsi masyarakat akan menimbulkan persoalan serius apabila tidak ditangani dengan baik, serius dan terencana.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang sudah sejak lama akrab dengan sampah dan segala problematikanya. Sama halnya dengan wilayah-wilayah yang lain, Kabupaten Banyumas “ditantang” untuk menghadapi problematika sampah yang sudah menjadi masalah sehari-hari masyarakat perkotaan dan pedesaan. Untuk menyikapi hal tersebut, Kabupaten Banyumas mengeluarkan sebuah produk kebijakan untuk mengatur pengelolaan sampah melalui suatu payung hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Melalui perda ini diharapkan pengelolaan sampah di daerah kabupaten banyumas lebih terencana dan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Perlu diketahui bahwa Banyumas sendiri menghasilkan lebih dari 900 ton sampah per harinya, dengan asumsi total jumlah penduduk sebanyak 1,6 juta jiwa menghasilkan sampah sebesar kurang lebih 0,6 kilogram per hari. Dari jumlah tersebut, 30% atau 300 ton di antaranya adalah sampah plastik (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/28/begini-cara-banyumas-kurangisampah-plastik-baru-pertama-di-jawa>, 17 Mei 2022). Ini memberikan gambaran bahwa butuh cara mengatasi yang lebih serius dari pemangku kepentingan sehingga masalah sampah ini tidak menjadi problematika tersendiri di kemudian hari.

Pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas secara resmi di bawah pembinaan satu instansi tingkat dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas untuk mengelola sampah dari aktivitas masyarakat hingga sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup terdapat unit pertanggungjawaban UPT (Unit Pelaksana Teknik) yang mengelola sampah yakni dari UPT Kota Purwokerto dan UPT Wilayah Banyumas Timur (di Banyumas) dengan TPA Kaliiori serta UKP Wilayah Ajibarang dan Wangon. Fungsi UPT untuk mempermudah pengelolaan sampah pada tiap zona pelayanan sampah atau dapat dikatakan merupakan

zoning persampahan di Kabupaten Banyumas. Kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Adapun sampah yang terletak di kawasan wisata Baturaden beserta sampah yang dihasilkan oleh hotel dikoordinir oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, sementara pengangkutannya oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Namun masalah sampah yang terus menumpuk seiring dengan bertambahnya penduduk terkhusus di wilayah Kabupaten Banyumas sendiri menjadikan Dinas Lingkungan Hidup cukup kerepotan untuk melakukan pengelolaan sampah apabila tidak bermitra dengan pihak lain. Oleh karenanya berdasarkan amanat dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2012, mulai saat ini penanganan sampah dilaksanakan secara kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dengan memfasilitasi dibentuknya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam penanganan sampah wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Teknik penetapan informan menggunakan metode *Purposive Sampling* untuk memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten banyumas. Para pihak yang terlibat diantaranya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun pihak yang diwawancara dari Dinas Lingkungan Hidup adalah para pegawai eselon 3 serta staf di Dinas Lingkungan Hidup serta dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) meliputi beberapa orang pimpinan dan staf. Berikutnya untuk data sekunder diperoleh dengan melihat data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas serta data-data lain yang mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

a. Hubungan Implementor dengan Kelompok Sasaran

Dilihat dari seperti apa hubungan antara implementor dengan kelompok sasaran, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk melayani masyarakat termasuk juga dalam hal ini adalah memberikan semacam pemahaman dan edukasi bagi masyarakat terkait dengan upaya pengelolaan sampah yang pada dasarnya merupakan suatu konsekuensi dan amanat dari undang-undang.

Secara teknis masyarakat diberikan pemahaman bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, yakni pemerintah mempunyai kewajiban, tetapi masyarakat melalui edukasi dari pemerintah juga berkewajiban mengelola timbunan sampahnya secara mandiri, baik dalam lingkup desa, RT, RW atau yang lebih luas dari itu. Termasuk pemberian contoh secara langsung dimana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mewakili beberapa petugas untuk terjun langsung di lapangan melaksanakan pendampingan. Artinya pemerintah berupaya untuk membangun prinsip kemitraan dengan masyarakat terkait pengelolaan sampah sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa telah terjalin suatu bentuk hubungan yang baik antara implementor dengan sasaran kebijakan itu sendiri yakni masyarakat. Peran pemerintah selaku implementor kebijakan dan pelayan publik sangat jelas, yakni mengupayakan bagaimana caranya agar suatu kebijakan dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Intinya bagaimana dapat melayani kepentingan dan keinginan masyarakat yang diakomodasi melalui suatu kebijakan.

Maka dari itu dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah, maka pemerintah memiliki kewajiban di satu sisi untuk melayani kepentingan masyarakat dalam hal menangani masalah sampah yang berasal dari masyarakat, sembari di sisi lain memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk mulai menangani dan mengelola sampah mereka sendiri, sehingga terjalin suatu bentuk kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Bahkan dengan

adanya prinsip kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat terlihat melalui terbentuknya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk menangani sampah secara mandiri yang menunjukkan adanya suatu bentuk profesionalisme dalam hal pelaksanaan kebijakan yang merupakan tuntutan di era Good Governance.

Jadi, hubungan implementor dengan sasaran kebijakan terjalin dengan baik, yang pada intinya implementor berupaya untuk memberikan pemahaman serta edukasi termasuk berupaya untuk membangun prinsip kemitraan dengan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah karena masalah sampah ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak.

b. Sosialisasi Program Kebijakan

Terkait dengan sosialisasi kebijakan, pada dasarnya kebijakan pengelolaan sampah ini secara rutin disosialisasikan oleh dinas kepada masyarakat setiap saat dan kesempatan, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kawedanan, bahkan sampai ke sekolah-sekolah melalui bermacam metode seperti pembinaan terkait pendirian Bank Sampah, komposisi rumah tangga, pembinaan lewat Wiyata Bhakti, siaran radio, serta mengeluarkan edaran bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup untuk menyetorkan sekilo sampah anorganik setiap bulan. Termasuk dalam hal ini mensponsori dilaksanakannya lomba kebersihan di tingkat desa untuk memotivasi warga masyarakat lokal dalam mengurus sampah secara mandiri.

Kemudian terkait dengan pihak yang terlibat dalam sosialisasi, bahwa pada dasarnya sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun melibatkan unsur-unsur lain termasuk masyarakat seperti kelompok KSM, PKK, serta kader lingkungan juga memiliki kewajiban untuk mengadakan sosialisasi sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran bersama dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Karena selaku dinas teknis, DLH juga punya tanggung jawab utama melaksanakan penanganan dan pengelolaan sampah, sehingga sinergi dengan pihak lain terutama dalam melakukan sosialisasi tentu merupakan hal yang wajar dengan tujuan sosialisasi dapat tersampaikan dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya sosialisasi berjalan dengan baik, dengan metode yang beragam dan intensitas yang dilakukan secara

rutin. Jadi dengan adanya sosialisasi maka informasi tentang suatu kebijakan akan mudah sampai di tengah-tengah sasaran kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Artinya jika proses sosialisasi berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan sosialisasi dapat dicapai, maka sosialisasi akan memberikan manfaat yang berguna dalam kehidupan masyarakat terutama dalam aspek bertambahnya kapasitas dan wawasan. Termasuk sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sendiri yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat terkait dengan mekanisme penanganan sampah secara mandiri dengan teknik tertentu.

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa sosialisasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan rutin baik secara terprogram maupun insidental di setiap wilayah yang ada. Adapun metode yang digunakan bermacam-macam diantaranya melalui siaran radio, surat edaran, termasuk melalui praktek pengolahan sampah dan pendampingan. Kemudian untuk intensitas komunikasi berjalan secara rutin dengan melibatkan unsur-unsur lain guna membantu kelancaran program kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber Daya

a. Kemampuan Implementor

Dilihat dari aspek kemampuan implementor, yang ditinjau dari tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan, pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor utama kebijakan memahami, namun pemahaman tersebut tidak sampai berujung ke tingkat masyarakat secara optimal. Artinya masih ada masyarakat yang menganggap bahwa masalah sampah bukan urusan mereka. Dicanangkannya perubahan kebijakan penanganan sampah secara mandiri oleh masyarakat dari pengumpulan sampah dengan pengangkutan ternyata belum berdampak secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena masih tertanam mindset dalam masyarakat bahwa pengelolaan dan penanganan sampah adalah urusan pemerintah.

Beragamnya respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah secara mandiri mengharuskan implementor di tingkat pusat yakni Dinas Lingkungan Hidup untuk turun ke lapangan memberikan pemahaman serta menggugah kesadaran masyarakat melalui pemberian materi

khusus terkait pelatihan pengelolaan sampah yang dilakukan secara berkala. Karena butuh waktu bagi masyarakat untuk dapat menerima suatu ketentuan yang baru diberlakukan oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa dari aspek kemampuan implementor yang ditinjau dari tingkat pemahaman implementor, disini implementor memahami sepenuhnya tujuan dan sasaran kebijakan walaupun terkadang tingkat pemahaman tidak selalu sampai di tataran lapangan, namun kondisi tersebut masih dapat diatasi. Kemudian dari aspek kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan, pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan dinamis karena implementor pusat cukup pro aktif untuk turun langsung ke lapangan menyampaikan program, termasuk memberikan pengarahan dan pembinaan.

Jadi, dari aspek kemampuan implementor, pada dasarnya pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah menjadi suatu ketetapan. Dalam aspek kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, tentu dibutuhkan adanya suatu kekuatan yang mampu menjadi pendorong keberhasilan kebijakan. Kekuatan yang lahir dari keyakinan yang ada pada diri seorang pekerja terhadap kemampuan dirinya (Saefudin, 2021). Menurut Robbins dkk (2008:56-66), kemampuan intelektual atau fisik tertentu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan memadai bergantung pada persyaratan kemampuan dan pekerjaan tersebut. Mujib (2016) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kemampuan fisik dan kedisiplinan dari pekerja berpengaruh terhadap kinerja pekerja.

Apabila dikaitkan dengan kemampuan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah, tentu bisa dikaitkan dengan sejauh mana tingkat pemahaman pelaksana terhadap isi dari kebijakan, dan sejauh mana kemampuan menyampaikan program kebijakan dan mengarahkan masyarakat untuk mampu pula berperilaku sesuai dengan yang diharapkan.

b. Ketersediaan Dana

Dilihat dari aspek ketersediaan dana, pertama ditinjau dari sumber dana, untuk kebijakan pengelolaan sampah ini mayoritas bersumber dari APBD, dengan tidak menutup kemungkinan adanya sumber lain walaupun dengan persentase yang

kecil. Hal ini cukup berbanding lurus dengan kurangnya akses kesejahteraan tenaga kerja dan pengadaan prasarana kerja terutama bagi petugas yang menjalankan tugas kebersihan di lapangan.

Kemudian ditinjau dari prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program, berdasarkan hasil wawancara bahwa dana operasional untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak cukup dan cenderung kurang, maka dari itu dinas berupaya mencari suatu terobosan untuk mengantisipasi kekurangan dana operasional tersebut dengan cara memberlakukan iuran bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah karena pada akhirnya pengelolaan sampah mandiri ini adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Bahkan besaran dana yang tersedia berbanding lurus terhadap sarana prasarana lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Adapun gambaran rinci terkait data jumlah sarana prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai penunjang kinerja aparat di lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Data Sarana Prasarana DLH Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Sarpras	UKP Purwokerto	UKP Ajibarang	UKP Banyumas	Jumlah	Keterangan
1	Dump Truck	14	7	3	24	Berfungsi
2	Pick Up	4	2	1	7	Berfungsi
3	Roda 3	1	12	1	14	Berfungsi
4	Gerobak Sampah	-	2	15	17	Berfungsi
Jumlah		19	23	20	62	Berfungsi

Sumber: DLH Kabupaten Banyumas

Dapat disimpulkan bahwa dari aspek ketersediaan anggaran, mayoritas bersumber dari pendapatan daerah atau APBD, dan tidak menutup kemungkinan ada sumber-sumber lain dengan jumlah persentase yang kecil. Adapun untuk kecukupan anggaran, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia tidak cukup untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah sehingga dipandang perlu mengadakan suatu strategi diantaranya menarik iuran kepada masyarakat termasuk menjadikan bidang kebersihan menjadi lembaga independen

yang bertanggungjawab langsung kepada bupati sehingga dimungkinkan dalam hal penerimaan anggaran operasional akan lebih baik dibandingkan sebelumnya ketika masih menginduk dengan dinas utama.

Salah satu faktor kesuksesan dan kelancaran jalannya suatu kebijakan adalah ketersediaan dana yang mencukupi, termasuk dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, tentu tidak bisa dipungkiri faktor dana atau finansial menjadi salah satu indikator keberhasilan. Menurut George C. Edwards III (Agustino, 2016), meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Jadi intinya ada dua sumber daya yang harus terpenuhi secara berimbang supaya suatu kebijakan dapat berjalan dengan lancar, yakni sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketersediaan dana untuk menunjang segala hal yang berhubungan dengan proses operasional dari jalannya suatu kebijakan itu sendiri.

Disposisi

a. Pembagian Wewenang dan Tugas Kerja

Terkait pembagian wewenang dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup tidak serta merta hanya mengurus masalah sampah namun juga mengendalikan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan dan pencemaran. Adapun untuk pengelolaan sampah berada di bawah kendali langsung dari Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang membawahi UKP (Unit Kebersihan dan Pertamanan) di wilayah untuk menjaga kebersihan jalan dan mengurus pengangkutan sampah dari TPS3R ke TPA. Namun sekedar sebagai pembanding bahwasanya di Provinsi Jawa Timur ada pemisahan secara nomenklatur antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan. Sehingga yang mengurus persoalan sampah adalah Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup hanya sekedar membuat kebijakan serta memantau dan mengawasi. Bahkan terkesan ada bias terkait peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, di satu sisi mendampingi masyarakat

mencari solusi untuk pengolahan sampah, dan di sisi yang lain melakukan teknis pengelolaan sampah. Sehingga perlu ada upaya untuk melakukan evaluasi ke depannya terkait peran dari Dinas Lingkungan Hidup ini.

Dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012, bahwa keterlibatan masyarakat dipandang perlu sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab bersama mengelola sampah di kawasan. Terutama masyarakat minimal memahami bahwa tanggung jawab persampahan adalah bukan lagi oleh dinas, atau seharusnya sedari awal tumbuh kesadaran bahwa siapa yang membuang sampah itulah yang harus bertanggungjawab. Oleh karenanya secara teknis KSM (Kelompok Swadaya masyarakat) berafiliasi untuk mengolah sampah di lingkungan sendiri, intinya bagaimana pengelolaan sampah yang awalnya sekedar 'kumpul angkut buang' diubah paradigmanya menjadi 'kumpul pilah olah' untuk dapat memanfaatkan kembali sisa sampah yang masih dapat digunakan. Adapun yang tidak dapat diolah itulah yang dinamakan residu yang nantinya akan dimusnahkan sehingga diharapkan dapat mengurangi kuota sampah yang terbuang sampai dengan 50% atau 10% saja.

Salah satu terobosan yang telah dilaksanakan oleh UKP Wilayah Purwokerto dalam penanganan sampah adalah memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat. Diantaranya dengan sigap dan siap menindaklanjuti setiap laporan atau aduan masyarakat tentang adanya sampah liar. Termasuk adanya wacana ke depan, akan ada Mobil Ambulans sampah yang pada intinya berfungsi/bertugas untuk mengambil atau mengatasi sampah-sampah di tempat-tempat kerja bakti masyarakat dan sampah-sampah liar yang tak bertuan di Wilayah Purwokerto

(<https://ukppurwokerto.wordpress.com/2017/08/05/pelayanan-prima-penanganan-sampah/>, 17 Mei 2022)

Dapat disimpulkan bahwa dari aspek pembagian wewenang dan tugas kerja, pada dasarnya penting untuk melakukan spesialisasi atau pembagian kerja sebagai bentuk mekanisme koordinasi yang baik dalam suatu organisasi. Terkait dengan pengelolaan sampah di Banyumas dalam hal ini berada di bawah kendali langsung dari Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup yang bermitra dengan

masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai bentuk profesionalisme tanggung jawab dalam menjalankan suatu program kebijakan.

b. Masalah yang Dihadapi dan Solusinya

Terkait dengan masalah yang dihadapi di lapangan, berdasarkan hasil penelitian bahwa kendala utama adalah berhubungan dengan pola pikir atau kesadaran masyarakat yang masih belum memahami aturan dengan baik sehingga tidak sedikit dari mereka yang masih membuang sampah di sembarang tempat. Termasuk wilayah Purwokerto sendiri dengan banyaknya penduduk sehingga berdampak terhadap sampah yang dihasilkan sampai sebanyak 40 truk dalam satu hari.

Kemudian terkait pengolahan sampah di TPS3R yang kurang optimal karena dikelola oleh orang-orang yang belum berpengalaman mengolah sampah sehingga berdampak terhadap residu sampah yang dihasilkan di TPS3R sampai dengan mencapai 40% dari yang seharusnya mencapai maksimal 15%. Termasuk juga adanya penolakan warga di sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kaliori yang berdampak terhadap penumpukan sampah di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas sehingga menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan. Namun secara *progress* sudah mulai terlihat ada arah yang lebih baik dengan sistem pengolahan sampah dari sumbernya.

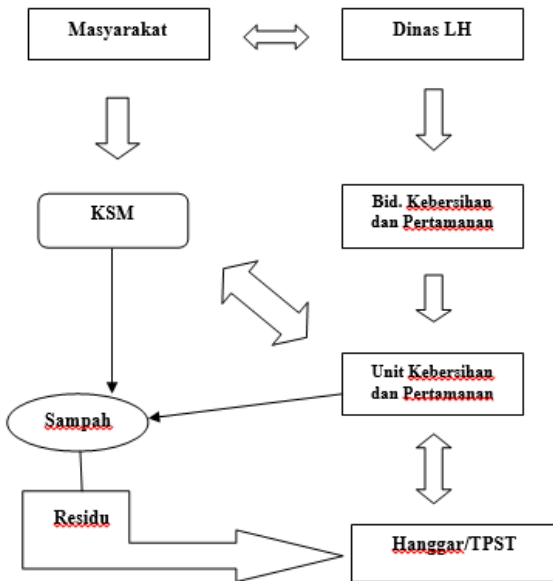
Adapun permasalahan lain yang ditemui di lapangan adalah masalah internal terkait kesejahteraan dan keamanan kerja. Minimnya penghasilan dari petugas lapangan sehingga tidak sedikit dari mereka yang menjual fasilitas kerja yang dimiliki seperti sepatu *boots* dengan tujuan menambah penghasilan sehingga berdampak terhadap beberapa kali terjadinya kecelakaan kerja seperti terpeleset dan tertusuk sisa sampah seperti tusuk sate, paku dan lain sebagainya.

Adapun terkait solusi untuk menghadapi masalah yang ada, diantaranya perlu keterlibatan semua elemen masyarakat khususnya KSM untuk menunjang pengelolaan sampah menjadi lebih optimal dan terkontrol. Secara teknis di tiap-tiap kelurahan yang ada perlu didirikan KSM untuk mengkoordinir sampah pada satu titik kumpul untuk dipilah sebelum dibawa ke TPST.

Dengan kata lain tiap-tiap wilayah yang ada dari kelurahan sampai kecamatan diharuskan untuk mengkoordinir dan mengelola sendiri sampahnya sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Jadi

semua wilayah mulai dari kelurahan sampai kecamatan bertanggungjawab terhadap sampahnya. Selain sebagai suatu bentuk terobosan dalam hal pengelolaan sampah secara kemitraan, sedikitnya personil Dinas Lingkungan Hidup di lapangan tentu menjadi kendala tersendiri dalam mengurus masalah sampah di wilayah Kabupaten Banyumas ini sehingga adanya kerjasama mutlak diperlukan.

Terkait dengan pembagian wewenang dan koordinasi berdasarkan hasil penelitian, maka bentuk bagannya adalah sebagai berikut:



Gambar. Bagan Pembagian Wewenang dan Tugas Kerja

Keterangan:

↓ : Garis Wewenang

↕ : Garis Koordinasi

→ : Garis Penindakan

Gambar tersebut di atas menunjukkan tentang bagaimana kerja sama antar lembaga dan mitra yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

- Dinas Lingkungan Hidup, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Banyumas berperan sebagai implementor kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.
- Bidang Kebersihan dan Pertamanan, sebagai salah satu bidang yang berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan

berperan menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

- Unit Kebersihan dan Pertamanan, sebagai UPT yang berada di bawah koordinasi Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dalam hal ini berperan sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di lapangan secara sektoral sesuai wilayah masing-masing.
- Kelompok Swadaya Masyarakat, sebagai mitra kerja dari Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. KSM adalah bentuk usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal terbatas dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian rakyat dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.
- Tempat Pengolahan Sampah terpadu, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat. Dalam hal ini berperan sebagai tempat penampungan dan pengolahan lebih lanjut sampah yang telah dipilah di sumbernya dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- Masyarakat, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagai mitra dari implementor utama yaitu Dinas Lingkungan Hidup melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dapat disimpulkan bahwa dari aspek masalah yang dihadapi dan solusinya, bahwa pada dasarnya setiap program kebijakan ketika diimplementasikan di lapangan akan selalu diwarnai dengan permasalahan yang bermacam-macam. Khususnya terkait pengelolaan sampah di Banyumas sendiri yang menghadapi berbagai kendala seperti *mindset* atau pola pikir dan kesadaran masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang justru menambah masalah karena kurangnya pengalaman, penolakan warga sekitar TPA yang berdampak terhadap semakin menumpuknya sampah karena tidak teratasi, termasuk kurangnya penghasilan dari tenaga kebersihan dan kurangnya fasilitas penunjang kerja sehingga berdampak pada keamanan dan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. Walau bagaimanapun keterlibatan masyarakat dalam suatu kebijakan merupakan suatu bentuk keniscayaan, termasuk keterlibatan

masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam kebijakan pengelolaan sampah sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat dan wujud dari tanggung jawab bersama.

Jadi, dilihat dari aspek disposisi, pertama dari dimensi pembagian wewenang dan tugas kerja, dalam hal ini koordinasi dan sinergitas antar *stakeholders* berjalan dengan baik dan masing-masing pihak memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga kebijakan berjalan efektif dilihat dari sudah tidak adanya lagi gejala tentang permasalahan sampah yang sempat memanas di pertengahan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pandangan Awaluddin Djamin (Hasibuan, 2017), yang menyatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Oleh karena Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga payung tidak hanya mengurus masalah sampah namun juga mengurus hal-hal lain yang berhubungan dengan lingkungan, maka dari itu terkait masalah sampah ditangani oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Jadi adanya pembagian wewenang dan tugas kerja menjadikan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik dan efektif serta terarah.

Kemudian dari aspek masalah yang dihadapi beserta solusinya, pada dasarnya berdasarkan hasil penelitian masalah yang ada berupa sulitnya untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berperilaku profesional dalam mengelola sampah secara mandiri, karena memang kebijakan sebelumnya dalam hal pengelolaan sampah kawasan dikelola sepenuhnya oleh dinas. Adapun masalah berikutnya adalah terkait dengan minimnya alokasi dana untuk kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri sehingga berimbas kepada kurangnya sarana prasarana penunjang termasuk juga pada aspek kesejahteraan tenaga. Jadi suatu kebijakan ketika diimplementasikan tentu akan menghadapi tantangan di lapangan yang sifatnya beragam, dan ini merupakan hal yang lumrah dalam dunia kebijakan publik.

Seperti yang dikemukakan oleh Effendi (2000) dan Darwin (2006) bahwa ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan, oleh Darwin (2006)

ditegaskan "karena itu, salah satu hal yang penting dalam studi implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat kesulitan suatu kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi. Maka dari itu terkait solusi untuk memecahkan masalah yang ada terkait implementasi kebijakan yakni dengan melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Banyumas dengan cara menggandeng Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai mitra kerja pelaksana kebijakan. Jadi dengan melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan akan mempermudah jalannya kebijakan serta meminimalisir dan memperkecil terjadinya masalah-masalah dalam kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi

a. Ketersediaan SOP

Dalam setiap program kebijakan ada semacam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berperan sebagai acuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kebijakan pengelolaan sampah terdapat SOP yang dibuat oleh dinas, termasuk dalam segala hal aktivitas dinas juga diatur oleh SOP. Oleh karenanya dengan adanya SOP menunjukkan suatu bentuk profesionalisme dalam tanggung jawab pengelolaan kebijakan dan artinya suatu kebijakan dibuat dengan pemikiran serta perencanaan yang matang, juga dengan adanya SOP tentu akan mempermudah para aparat di lapangan dalam menjalankan tugas mereka.

b. Sistem Pengawasan

Terkait dengan sistem pengawasan dalam pelaksanaan program kebijakan, pada dasarnya berjalan dengan baik dan intens karena ada personil khusus yang melaksanakan, dan oleh karena sampah adalah material yang mudah membusuk sehingga membutuhkan penanganan yang cepat maka dari itu adanya pengawasan merupakan suatu keniscayaan. Namun, pengawasan dipastikan berjalan baik selama dalam lingkup satu dinas. Karena pengawasan ini tidak berlaku secara lintas oleh dinas lain, dan kalau pun ada pengawasan yang bersifat lintas dinas itupun bersifat kondisional karena menyangkut dengan wilayah seperti pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) terkait penggunaan lahan hijau dan izin

amdal dalam pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Dapat disimpulkan bahwa dari aspek sistem pengawasan, pada dasarnya mekanisme pengawasan dalam suatu program kebijakan merupakan suatu bentuk keniscayaan untuk memberikan jaminan bahwa suatu kebijakan berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah, sistem pengawasan pun berjalan secara efektif karena memang ditunjang oleh kesiapan aparat di lapangan. Intinya pengawasan ini berjalan untuk menjamin bahwa masalah sampah yang ada di wilayah Banyumas akan tertangani dengan baik seperti yang diharapkan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

c. Sistem Pelaporan Kerja

Terkait dengan aspek pelaporan kerja, bahwa mekanisme yang berjalan di Dinas Lingkungan Hidup khususnya Bidang Kebersihan dan Pertamanan cenderung bersifat fleksibel, dengan kata lain laporan kerja tetap ada namun tidak terlalu dituntut dan ditekankan, karena yang menjadi indikator adalah kinerja petugas di lapangan. Termasuk dalam hal ini adalah fleksibilitas dalam memberikan pelaporan yang tidak harus secara tertulis dan formal namun dapat pula dilakukan secara virtual dan nonformal semisal melalui WA grup.

Oleh karena itu, dari aspek pelaporan kerja, pada dasarnya hal ini merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban terkait kinerja di suatu organisasi. Adapun dalam konteks aktivitas yang dijalankan aparat di Dinas Lingkungan Hidup, khususnya mereka para petugas lapangan yang biasa berhubungan dengan dunia teknis sehingga mengutamakan optimalisasi kinerja dan adanya pengecualian-pengecualian yang bersifat khusus karena kondisi di lapangan, maka sangat dimaklumi dengan adanya suatu bentuk sistem pelaporan kerja yang tidak bersifat legalistik dan lebih cenderung fleksibel.

Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan hasil penelitian dilihat dari dimensi ketersediaan SOP, pada dasarnya kebijakan pengelolaan sampah yang bermuara pada perda nomor 6 tahun 2012 memiliki SOP yang jelas sehingga mempermudah para aparaturnya pelaksana dalam hal mengimplementasikan kebijakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang ada. Menurut Fatimah,

dkk (2015) tujuan utama dari penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah untuk memberikan panduan atau pedoman kerja agar kegiatan dapat terkontrol, sehingga dengan terkontrolnya kegiatan maka target yang ingin dicapai dapat terwujud dengan maksimal. Jadi dengan adanya SOP dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas akan memberikan semacam koridor/peta jalan yang intinya dapat dijadikan pegangan bagi *stakeholders* dalam mengimplementasikan kebijakan secara lebih terukur.

Kemudian dilihat dari dimensi sistem pengawasan, maka berdasarkan hasil penelitian sistem pengawasan berjalan dengan baik dan efektif. Apalagi menyangkut sampah yang merupakan material mudah membusuk sehingga membutuhkan penanganan yang cepat, maka pengawasan dalam hal pengelolaan menjadi suatu keniscayaan. Dalam dunia manajemen, pengawasan merupakan bagian dari koordinasi yang merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Jadi dengan adanya pengawasan akan memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan akan berjalan dengan baik, efektif dan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Terkait dengan dimensi sistem pelaporan kerja, maka berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terlepas dari masalah teknis, sistem pelaporan kerja di Dinas Lingkungan Hidup berjalan dengan baik dan cenderung bersifat fleksibel. Dengan adanya sistem pelaporan kerja menunjukkan suatu bentuk pertanggungjawaban moral atas amanat pekerjaan atau tugas yang dibebankan serta menunjukkan adanya nilai etika yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana tugas terhadap pihak yang memberi tugas, dan juga hal ini merupakan bagian dari mekanisme koordinasi dan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proses manajemen. Adapun terkait jenis pelaporan yang dilaksanakan, apabila menyangkut lembaga teknis yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, maka bentuk laporannya pun bersifat teknis.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menggambarkan bahwa telah terjalin hubungan kedekatan yang cukup kuat antara implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan yaitu masyarakat. Terlihat dari berjalannya mekanisme sosialisasi kebijakan yang dijalankan oleh dinas yang bersifat rutin serta cukup intens

kepada masyarakat dengan berbagai metode yang ada. Selanjutnya jika dilihat dari segi kemampuan para aparatur dinas telah memahami dan mampu untuk menjalankan kebijakan, namun kendala di lapangan cenderung tidak mudah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah secara mandiri karena terkait pola pikir/*mindset* masyarakat yang selama ini terbiasa dilayani dalam pengelolaan sampah. Termasuk keterbatasan anggaran dana yang cenderung cukup berpengaruh terhadap kelancaran operasional lapangan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Apabila dilihat dari pembagian wewenang dan tugas kerja, telah terjalin kemitraan yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), sehingga kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas menjadi lebih bermakna dan bersifat holistik sebagai tanggung jawab bersama. Namun dinamika di lapangan terkait dengan kurangnya pengalaman dari masyarakat dalam mengelola sampah dan keterbatasan dana operasional menjadikan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Berikutnya jika dilihat dari struktur birokrasi dapat ditarik benang merah bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tersedia mampu memberikan kemudahan bagi aparatur pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka. Termasuk dalam hal ini berjalannya sistem pengawasan dan pelaporan kerja menunjukkan bahwa mekanisme kerjasama dan profesionalisme dalam tugas yang merupakan syarat dasar manajemen kerja berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Darwin, Muhadjir. 2006. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendi, Sofian. 2000. *Reformasi Kependidikan dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Fatimah, Endah Nur, dkk. 2015. *Strategi Pintar Menyusun SOP*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Goodnewsfromindonesia.2022. *Begini Cara Banyumas Kurangi Sampah Plastik, Baru*

Pertama di Jawa!. Diperoleh 17 Mei 2022. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/05/17/begini-cara-banyumas-kurangi-sampah-plastik-baru-pertama-di-jawa>

- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, B., Prabawati, I. & Tauran. *Integrasi Kebijakan Lingkungan: Koordinasi Dalam Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12 (1), 93-104
- Mujib, Kurniash, D. & Rokhman, A. (2016). *Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui peningkatan motivasi spiritual. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 29, 4, 204-211
- Robbins, S.P. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. Jakarta: Prehallindo.
- Saefudin, W., Bestari, D. K. P., Aisyah, M., & Mujib, M. (2021). *Pengaruh Efikasi Diri dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan di Wilayah Kalimantan Barat. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 117-128.
- Ukppurwokerto.wordpress. 2022. *Pelayanan Prima Penanganan Sampah*. Diperoleh 17 Mei 2022. <https://ukppurwokerto.wordpress.com/2022/05/17/pelayanan-prima-penanganan-sampah/>

